

# Tantangan Kerja Sama Awam dan Religius dalam Kerasulan

Johanes Eka Priyatma

Pergulatan tentang kerja sama antara awam dan religius dalam karya kerasulan Gereja Katolik sudah lama berlangsung. Pokok persoalan yang kerap muncul adalah bagaimana kerja sama tersebut diletakkan dalam kerangka pengembangan karya kerasulan yang semakin kompleks dan penuh tantangan?

DI TENGAH maraknya politik identitas yang bermuara pada lahirnya masyarakat yang tersekat berdasar agama, karya kerasulan Gereja Katolik Indonesia sungguh menghadapi tantangan yang besar. Karya kerasulan sebagai wujud konkret dari usaha menghadirkan kerajaan Allah di tengah masyarakat harus kita kritisi cara hadirnya di tengah mayoritas yang tidak seiman ini.

Hal tersebut sangat strategis di masa depan, terlebih bila dipahami bahwa tujuan utama kerasulan tersebut bukan demi bertambahnya jumlah pemeluk iman Katolik, tetapi demi hadirnya tata masyarakat yang semakin mendekati kehendak Allah sendiri, yakni hadirnya cinta kasih dan persaudaraan.

Usaha mulia ini berhadapan dengan kenyataan bahwa masyarakat tidak mudah menerima kehadiran karya kerasulan Gereja. Penolakan kegiatan bakti sosial Gereja Pringgolayan, Bantul, Yogyakarta oleh kelompok Islam garis keras beberapa waktu lalu hanyalah salah satu sinyal akan kenyataan pelik ini. Sementara itu, Gereja Katolik mempunyai banyak karya kerasulan lain yang mungkin akan menghadapi tantangan yang sama, meskipun karya tersebut bersifat legal dan dilindungi oleh negara seperti sekolah, rumah sakit, panti jompo, asrama, dan lain-lain.

Tidak ada cara lain yang lebih mujarab selain berusaha sekuat tenaga untuk terus mengkritisi dan menggagas ulang cara hadir Gereja dalam karya-karya tersebut di tengah kenyataan ini. Menguatnya politik identitas haruslah ditangkap sebagai peluang atau kesempatan emas bagi Gereja untuk berdaya

upaya demi karya kerasulan yang semakin relevan dan berkualitas.

Dalam taraf tertentu, realitas ini harus menjadi energi positif yang mendorong Gereja untuk terus belajar memahami konteks kehadirannya di tengah mayoritas. Artinya, berkembangnya karya kerasulan kita tentu sangat strategis, tidak hanya bagi eksistensi iman, nilai Katolik di Indonesia, tetapi juga di dalamnya mewujudkan tujuan bernegara, menggapai keadilan dan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat.

Kemajuan bangsa hanya bisa terwujud bila kita berhasil membantu masyarakat untuk berpikir, bertindak lebih rasional, dan mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan. Hal ini bukanlah perkara mudah, karena adanya peperangan antara dua mazhab besar, yakni antara yang berpikir rasional membawa "surga ke dunia" berhadapan dengan mereka yang berpikir emosional membawa "dunia ke surga".

Bila karya kerasulan Gereja dipahami memiliki peran strategis seperti ini, meskipun dalam berbagai forum terungkap berbagai persoalan, seperti minimnya dana; rendahnya penerimaan masyarakat; kurangnya tenaga terampil; serta semakin sedikitnya jumlah masyarakat non-seiman yang dilayani, jika kita kritisi secara mendalam masih terbentang luas berbagai kemungkinan dan solusi.

Secara umum, strategi yang paling tepat untuk mengembangkan kerasulan dewasa ini adalah inovasi dan kreativitas. Dua kata ini indah didengar, tetapi mengandung konsekuensi yang berat untuk diwujudkan. Berikut adalah dua isu yang relevan untuk



Slamet Riyadi

direfleksikan demi perkembangan kerasulan di tengah tantangan Indonesia terkini.

### Kompetisi Versus Komplementasi

Meski karya kerasulan selalu bersifat sosial dan karenanya berorientasi nirlaba, tetapi tidak dapat dihindari adanya kompetisi antarkarya sejenis, baik di lingkungan internal Gereja maupun karya lain di luar Gereja. Kenyataan ini berakibat pada semakin melemahnya peran dan posisi beberapa karya, misalnya sekolah-sekolah Katolik di berbagai daerah pinggiran karena kalah bersaing dengan sekolah negeri atau sekolah swasta lain yang malah tidak berorientasi sosial.

Sejauh pemahaman saya, hal ini bukan pertama-tama disebabkan oleh mahalnya biaya layanan karya kita, tetapi oleh karena kalahnya karya kita bersaing dalam memberikan layanan yang berkualitas. Memang, SD negeri memberikan layanan pendidikan gratis atau murah, sehingga wajar kalau masyarakat tidak lagi berminat menyekolahkan anaknya di SD Katolik yang tidak gratis. Anehnya, muncul beberapa SD swasta modern yang biayanya mahal tetapi sangat diminati masyarakat.

Karena keterbatasan dana dan sumber daya lain, karya kerasulan kita sulit dikembangkan

dalam perspektif persaingan ini. Sementara itu, selain masalah dana dan sumber daya manusia, karya Gereja yang berada di tengah mayoritas Muslim menghadapi persoalan lain yang lebih berat, yakni semakin menurunnya penerimaan masyarakat. Hanya tinggal satu solusi tersisa, yakni dengan menggagas ulang orientasi karya kerasulan Gereja, sehingga menjadi karya yang bersifat alternatif atau komplementasi terhadap karya sejenis yang berasal dari mana pun.

Sebagai contoh, masifnya kendali pemerintah terhadap sekolah negeri dan swasta saat ini telah menjadikan pengelolaan SD Katolik tiada bedanya dengan SD negeri yang lebih sibuk dengan pemenuhan administrasi sekolah yang menghabiskan energi guru. Selain itu, kurikulum yang digunakan sarat dengan muatan akademik yang membebani siswa.

Yang lebih memprihatinkan adalah berkembangnya paham pembelajaran bahwa ujian adalah segala-galanya demi berkembangnya pengetahuan siswa. Telah terjadi reduksi yang luar biasa bahwa belajar adalah ujian. Di tengah suasana persekolahan semacam itu, pendidikan Katolik sebaiknya dikembangkan, sehingga tidak hanya orientasinya yang berbeda dengan kebanyakan sekolah, tetapi sungguh menjadi sekolah yang "baik" dan

“benar” karena mampu mewujudkan prinsip pendidikan yang holistik.

Jika kebanyakan sekolah berlomba-lomba pada pencapaian akademik saja, maka sekolah Katolik sebaiknya justru mencurahkan energi yang banyak dalam pengembangan kesenian dan kebudayaan. Hal ini bukan hanya akan menjadikan sekolah Katolik menjadi alternatif, tetapi sangat strategis di tengah semakin populernya gerak masyarakat meninggalkan budaya lokal karena terbius budaya asing, baik dari Barat maupun Timur Tengah.

Orientasi alternatif dalam karya pendidikan bisa juga diwujudkan dengan tetap setia menghidupi semangat memberi perhatian kepada yang kurang mampu. Karya kerasulan kita tidak hanya diminati masyarakat, tetapi juga menutup kekosongan pendekatan budaya dalam pendidikan bila kita mampu menghadirkan sekolah dengan orientasi pendidikan holistik dan sekolah tersebut dihadirkan sedemikian rupa menjadi lebih murah daripada sekolah negeri atau malah gratis sama sekali.

Bagi saya, hal ini mungkin jika kita mampu membangun jejaring untuk mengenali berbagai sumber daya yang ada di sekitar kita dan rela berpikir keras demi lahirnya inovasi. Bukankah di sekitar kita banyak orang dan lembaga yang mempunyai cita-cita serupa, dan bukankah juga banyak pihak yang bisa dan gembira hati menjadi guru tanpa harus menjadi pegawai di sekolah tersebut.

### Profesionalitas Karya

Orientasi karya kerasulan yang nirlaba tidak dapat menjadi alasan untuk mengelolanya secara profesional. Hal ini penting dan sangat strategis, karena meskipun sekarang berkembang preferensi masyarakat berbasis agama, tetapi masyarakat masih tetap menempatkan layanan profesional yang berkualitas tinggi sebagai pilihan utama.

Saya selalu terkesan dengan peran dan kontribusi yang dapat diberikan oleh Profesor Yohanes Surya. Semua orang tahu bahwa beliau adalah seorang Katolik. Semua pihak, baik pemerintah maupun swasta, baik Katolik maupun tidak, sangat menghargai dan mengharapkan untuk dapat bekerja sama dengannya. Oleh karena itu, untuk mewujudkan suatu karya kerasulan yang profesional, banyak hal harus kita benahi, bahkan banyak asumsi yang perlu kita revisi.

*Pertama*, mengenai pemahaman kita tentang makna nirlaba atau *not for profit*.

Hal ini berarti bahwa karya kerasulan kita tidak pernah mengubah status dana publik yang diperolehnya menjadi bersifat privat. Konsekuensinya, langkah menjadi profesional adalah mempertanggungjawabkan setiap penggunaan dana publik kepada semua pemangku kepentingan secara transparan dan akuntabel.

Dalam karya pendidikan, misalnya, semua dana yang diperoleh dari peserta didik haruslah demi kepentingan pemberian layanan kepadanya. Dengan demikian tidak ada dari dana tersebut yang beralih pengelolanya untuk kepentingan lain di luar kepentingan pendidikan. Atas dasar ini, Pemerintah tidak mengenakan pajak dalam kurun waktu tertentu, yakni maksimum 4 tahun untuk PT (perguruan tinggi-**Red.**), karena bila lebih dari 4 tahun maka ada kemungkinan dana yang diperoleh dari mahasiswa digunakan di luar kepentingan pendidikannya yang seharusnya sudah selesai dalam 4 tahun.

Pengelolaan dana karya kerasulan secara transparan dan akuntabel hanya mungkin kalau dilakukan memakai sistem tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan. Ini bukan hanya perkara ada tidaknya audit yang sistemik, tetapi juga menyangkut perkara kejelasan dan konsistensi alokasi pendanaan yang sesuai dengan intensi untuk apa dana tersebut diperoleh. Sejauh yang saya ketahui, karya kerasulan kita masih kedodoran dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel ini mulai dari absennya akuntan, tiadanya sistem yang baik, serta kurangnya transparansi data keuangan yang diberikan kepada segenap pemangku kepentingan.

*Kedua*, profesionalisme karya kerasulan sangat tergantung kepada kemampuan kita menghidupi prinsip *the right man on the right place*. Perkara ini menjadi semakin pelik bukan hanya karena keterbatasan sumber daya manusia, tetapi juga karena hambatan sosial psikologis yang pasti muncul di dalam karya yang digarap bersama awam dan para rohaniwan yang selibat seperti Rama, Bruder, dan Suster. Tidak dapat kita sangkal bahwa identitas selibater akan membawa konsekuensi posisi yang tidak setara dengan awam, lebih-lebih kebanyakan karya memang dipahami sebagai “milik” dari kongregasi selibater tersebut berasal.

Pergulatan Gereja di seputar pelibatan dan peran awam dalam karya kerasulan sering kali ditempatkan semata sebagai

akibat dari persoalan semakin menurunnya jumlah selibater, terutama pastor atau rama. Pergulatan ini akan lebih produktif bila ditempatkan bukan pertama-tama karena jumlah selibater yang menurun. Kerangka pikir ini hanya akan mengukuhkan pandangan bahwa relasi awam dengan selibater dalam karya menjadi tidak setara, tetapi bersifat patronistik dan mencampuradukkan antara kompetensi kerohanian dan kompetensi profesionalitas.

Hal ini tentu bertentangan dengan kerinduan Gereja Katolik yang ingin terus menghormati dan menghargai kharisma khusus yang dimiliki, baik oleh awam maupun selibater. Untuk itu, setiap karya sebaiknya mengembangkan model organisasi dan kepemimpinan yang baik, yakni profesionalitas menjadi tolok ukur yang penting. Perlu segera diakhiri dikotomi kepemimpinan awam dan selibater, karena masalahnya bukan pertama-tama siapa yang memimpin, tetapi lebih pada model dan perwujudan praktik kepemimpinannya.

Salah satu isu krusial yang masih menjadi persoalan dalam relasi awam dan selibater dalam karya kerasulan ini adalah masalah kepemilikan karya. Apabila kepemilikan karya dipahami secara sederhana sebagai milik kongregasi dan untuk itu harus mewujudkan dalam kepemimpinan puncak anggota kongregasi, maka prinsip "*the right man on the right place*" akan sulit diwujudkan. Oleh karenanya perlu dikembangkan kesadaran baru bahwa kepemilikan karya kerasulan lebih terkait terutama dengan tujuan mulia dari karya tersebut ketimbang terkait dengan status kepemilikan kekuasaan.

Dalam karya pendidikan, misalnya, pemilik sejati karya tersebut adalah generasi muda itu sendiri, sehingga seluruh harta benda karya tersebut memang bukan bersifat privat, tetapi milik publik yang pemanfaatannya harus dipertanggungjawabkan secara publik. Bila harta benda yang ada beralih status menjadi privat, maka sebenarnya karya kerasulan tersebut tidak *not for profit*.

Keteguhan kita menghidupi hal-hal mendasar di atas sebagai konsekuensi demi lahirnya karya kerasulan yang profesional memang membutuhkan revisi dari berbagai asumsi yang sering tidak sadar kita pilih. Asumsi itu antara lain bahwa karyawan dalam sebuah karya tidak perlu memiliki hidup yang sejahtera. Mewujudkan karyawan yang

sejahtera harus menjadi tujuan dari setiap kerasulan karena akan menjadi prasyarat lahirnya profesionalitas karya.

Bahwa Gereja harus membela orang miskin tidak harus mewujud dalam realitas bahwa karyawan dalam karya juga miskin. Kerinduan Gereja melayani orang miskin sebaiknya memacu kreativitas dalam mencari dukungan finansial dari sebanyak mungkin pihak. Dukungan itu akan mudah diperoleh bila karya kerasulan memberikan dampak signifikan, dan hal itu hanya mungkin lewat karya profesional.

Akhirnya, keberanian dan kerelaan untuk menggagas ulang cara kita mengelola karya kerasulan akan menjadi kunci keberhasilan. Namun demikian, hal itu hanya mungkin bila ada keterbukaan untuk menerima berbagai pandangan dan penilaian kritis dari berbagai pihak.

Bila kita belajar dari fenomena kemunduran lembaga bisnis semisal Bluebird oleh karena kehadiran jasa pertaksian berbasis digital, maka kita memang harus terus mencari model-model pengelolaan kerasulan secara kreatif dan inovatif. Pencarian tersebut akan dengan rela kita lakukan jika kita berani untuk terus melakukan *discernment* terhadap kebiasaan, posisi, peran, serta realitas panggilan hidup kita masing-masing.

Pada zaman yang penuh dengan peristiwa yang *disruptif* ini, kerelaan kita untuk melakukan *discernment*, baik secara personal maupun institusional, akan menjadi kunci pengembangan karya yang tanggap zaman. Semoga. ♦

**Johanes Eka Priyatma**  
Rektor Universitas Sanata Dharma,  
Yogyakarta